





satu kawasan industry atau lokasi berdirinya pabrik, yaitu: pertama, pertimbangan produktifitas tanah yang kurang menguntungkan karena kesuburan tanah yang tidak cocok dengan lahan pertanian. Sebagian tanahnya berupa rawa-rawa yang di tumbuhi alang alang.

sedangkan alasan lainnya adalah pertimbangan jumlah penduduk atau populasi penduduk yang tidak seimbang dengan luas tanah yang tidak seimbang dengan luas tanah yang terbentang, hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda di bawah tingkat rata-rata. Pertimbangan yang terakhir ialah turut serta dalam menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat rungkut kidul dan sekitarnya.

Wilayah kelurahan rungkut kidul ini letak administrasi pemerintahannya masuk kecamatan rungkut yang masuk wilayah kerja tingkat II kota madya Surabaya wilayah selatan. Jarak radius kelurahan rungkut kidul dengan pusat administrasi kecamatan 2 km. sedangkan jarak radius kelurahan rungkut kidul dengan pusat pemerintahan kota madya Surabaya wilayah timur diperkirakan berkisar 6 km sampai dengan 10 km.

Untuk mencapai kelurahan rungkut kidul tidak terlalu sulit, karena kelurahan rungkut kidul letaknya di sepanjang jalan raya dan sarana transportasi sangat mudah didapat, baik dari daerah waru sidoarjo ataupun dari daerah terminal joyoboyo Surabaya. Adapun letak kelurahan rungkut kidul batas wilayahnya sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan kali rungkut dan termasuk kecamatan rungkut.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan rungkut tengah dan masuk kecamatan gunung sari.
3. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan kendang sari dan masuk wilayah kecamatan terenggilis mejoyo.
4. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan medokan ayu dan masuk dalam kecamatan rungkut.

Sebagaimana yang penulis telah diskripsikan bahwa tingkat ketidak suburhan tanah merupakan factor yang dominan dalam menentukan berdirinya lokasi kawasan industry yang merupakan alternative pemanfaatan lahan yang kurang produktif sehingga konsekuensinya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Secara kongkrit data penggunaan tanah dapat kita lihat yang penulis himpun. Keseluruhan wilayah rungkut kidul adalah 117.460 Ha. Yang terbagi atas:

Tabel .3.1

Tentang penggunaan tanah

Jenis tanah	Luas tanah	%
Tanah pemukiman	45.010 HA	38.319%
Rawa rawa	7000 HA	5.959%
Lahan industry	60.000 HA	31.081%
Tanah pemukiman	1.425 HA	1.213%





tentu mempengaruhi pola pikir masyarakat dan perilaku kemanusiannya.

Hal yang paling Nampak sebagai kawasan industrialisasi yang lebih mempertimbangkan untung dan rugi dan unsure rasionalnya sehingga menghilangkan rasa gotong royong, sikap hidup yang untuk mengejar materi dan kepuasan pribadi serta lebih memperhatikan unsure keduniawian ketimbang unsure yang berkaitan dengan agama.

Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan istilah kelas social dan setatus social dikarenakan oleh beberapa factor diantaranya adalah perbedaan penduduk asli dan penduduk musiman. Selain itu perbedaan setatus social juga turut mewarnaikelurahan ini. Hal ini dapat dilihat dalam pandangan masyarakat yang bisa di kenal dengan istilah wong cilik (kaum buruh) dan wong gedhe (kelompok yang memiliki kedudukan dan modal). Dalam kehidupan social keagamaan mereka mengenal istilah santri, kyai dan abangan, yang secara simbolis kaum abangan di gambarkan dengan kehidupan kelompok tertentu yang memiliki kekuatan gaib, benda benda keramat serta minusnya pemahaman keagamaan.

Dibidang pemerintahan kelurahan rungkut kidul wilayahnya terbagi menjadi dua tempat, pertama wilayah penduduk asli dan kedua wilayah perumahan YKP. Namun kekuasaan





























perempuan dan anak, tidak adanya perlindungan yang sejati bagi buruh migran yang bekerja di luar negeri serta segudang masalah lainnya. Seluruh masalah ini berakar pada kebijakan rejim yang tidak pernah menyentuh atau berpihak kepada rakyat Indonesia. Rejim ini jauh lebih mementingkan kepentingan kapitalisme monopoli, menjalankan apa yang menjadi keinginannya tanpa pernah peduli akan kehidupan rakyatnya.

Kaum buruh penting memahami situasi yang demikian untuk kemudian menggalang dan memperkuat persatuan, tidak hanya sebatas sektoral buruh semata namun harus sanggup menjangkau seluruh sektor yang ada didalam masyarakat. Persatuan diantara sektor-sektor masyarakat inilah yang sesungguhnya mempunyai kedudukan dan peranan penting didalam perjuangan, yang akan memberikan jaminan kemenangan bagi rakyat Indonesia setahap demi setahap.

Hingga saat ini, kaum buruh di Indonesia masih menghadapi persoalan perampasan upah yang berlangsung secara sistematis. Kepmen 231/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah adalah salah satu instrumennya. Keberadaan Kepmen ini yang membuat lebih dari seribu perusahaan tahun ini menanggukkan upah bahkan melakukan PHK.

Masih dipertahankannya sistem kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing, jaminan sosial yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh negara melainkan dibebankan kepada kaum buruh adalah skema penindasan yang lainnya. Belum lagi berbagai tindakan kekerasan terhadap buruh dan



Isu yang diangkat adalah 1) Upah; 2) kerja gugur-gunung yang terlalu berat; 3) kerja jaga 1 hari tiap 7 hari; 4) kerja moorgan yang tetap dijalankan padahal tidak lazim lagi; 5) upah tanam sering tidak dibayar; 6) banyak pekerjaan tidak dibayar padahal bukan kerja wajib; 7) harga yang dibayar pengawas terlalu murah dibandingkan harga pasar; 8) pengawas Belanda sering memukul petani.

Kasus-kasus perburuhan, seperti aksi unjuk rasa dan PHK terhadap buruh kerap mewarnai pemberitaan media-media massa. Dari tahun ke tahun persoalan tersebut terus muncul dan tak pernah terselesaikan. Kondisi buruh di Indonesia terus memburuk terutama di sektor-sektor padat karya yang banyak memberlakukan tenaga kerja tidak tetap. Hal ini mau tidak mau menunjukkan ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan masalah perburuhan dan mencerminkan tidak berkembangnya gerakan buruh di Indonesia.

Dalam tulisan ini penulis hanya berkeinginan untuk memaparkan pembabakan yang telah ditempuh oleh gerakan buruh Indonesia, situasi sosial ekonomi yang sedang berkembang dan akibat yang dirasakan oleh kaum buruh Indonesia dalam tiap babak pergerakan. Pembabakan ini mulai dari masa kolonial sampai pada masa reformasi. semata ditujukan untuk membedakan kehidupan sosial ekonomi buruh, unsur-unsur yang berfungsi sebagai tulang punggung gerakan dan manfaat



Dimana para buruh sering ditipu oleh para pemilik kebun saat memberikan gaji. Kuli ditempatkan dalam barak sebagai tempat tidur bersama. Barak itu tidak dilengkapi dengan perabotan yang memadai. Barak hanya berdinding papan, berlantai tanah dan beratap daun rumbia. Untuk kasus biasanya kuli menggali lubang disekitar barak. Kondisi barak yang demikian menyebabkan kuli sangat rentan terkena penyakit. Ordonansi kuli pada waktu itu mewajibkan perusahaan memberikan pelayanan kesehatan bagi kuli. Namun realitasnya perawatan kesehatan yang memadai kuli tidak pernah ada. Rumah sakit perkebunan tidak dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, tidak ada kamar mandi, tidak ada penerangan di malam hari, tidak ada ruang khusus untuk pasien penyakit menular, tidak ada bantal atau kasur, dokter yang jarang memeriksa keadaan pasien dan sebagainya. Kondisi demikian menyebabkan kuli sering tidak mau dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit dianggap sebagai pintu menuju kematian.

Pemaksaan terhadap kuli agar mau bekerja tidak hanya dilakukan lewat mekanisme hukuman. Cara lain yang dipakai adalah dengan memberi hadiah pada kuli yang rajin dan tunduk pada perusahaan. Bentuk hadiahnya seperti diangkat jadi pengawas atau diberi sepetak lahan kebun. Untuk menjamin kuli tidak melarikan diri, pemilik kebun membangun tembok sekeliling kebunnya. Pemilik kebun juga membentuk semacam tim untuk







Bond (1917). PFB adalah sebuah serikat buruh yang dibentuk oleh Soerjopranoto, yang kelak akan dikenal sebagai salah seorang “radja mogok” Hindia Belanda. pemogokan yang dilakukan PFB tertuju pada 3 sasaran, yaitu: ‘Berusaha mendapat kuasa dalam pemerintahan negeri supaya negeri diperintah oleh rakyat sendiri mengurus jalannya rejeki, mengeratkan kaum buruh dalam pekerjaannya guna merubah nasibnya, mengadakan perdagangan oleh dan buat rakyat (koperasi).’

Pada masa Soekarno memerintah, pada tahun 1950 Soekarno memutuskan untuk mengundang unsur-unsur progresif dalam pembentukan kabinetnya, SOBSI telah kembali berdiri dan semakin menguat dalam dasawarsa tersebut. Pada dasawarsa tersebut, SOBSI adalah serikat buruh terbesar dan terkuat di Indonesia, dengan 2,5 juta anggota dan 34 serikat buruh anggota. Selain SOBSI, ada dua lagi serikat buruh beraliran progresif yang patut disebut.

Yang pertama adalah GASBRI (Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia) yang dekat dengan Partai Murba. Partai Murba sendiri adalah hasil pengembangan dari sekelompok orang yang di tahun 1946 memisahkan diri dari SOBSI. Dalam kongresnya tahun 1951, GASBRI berubah nama menjadi SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Revolusioner Indonesia).

Yang kedua adalah SARBUPRI (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) yang didirikan tahun







Di lingkup internal, terjadi perubahan karakteristik konstituen yang dimobilisasinya yang ditandai dengan maraknya sistem kontrak, borongan, kerja paruh waktu, jangka pendek, dan pekerjaan kasual, penggunaan agen tenaga kerja atau pun outsourcing, dan self employment.

Perubahan sistem kerja yang menjadi lebih fleksibel mendorong terjadinya diferensiasi angkatan kerja dan pekerjaan menjadi lebih heterogen. Hal inilah yang membentuk agenda perjuangan SB terfokus pada kondisi kerja, upah, dan menghalangi kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan dan memecat buruh sesuka hati. Setidaknya, itulah prinsip yang dicanangkan secara teoritik. Kenyataannya, rekonstruksi serikat buruh dilaksanakan dalam bentuk FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang diketuai Agus Sudono, mantan ketua Gasbiindo, dan sekjenya adalah Suwanto, seorang mantan perwira Opsus (Operasi Khusus, pendahulu Kopkamtib).

Di bawah komando dua orang petinggi Golkar ini, serikat buruh memang dilepaskan dari kekuatan politik manapun—dan jatuh ke dalam cengkeraman Golkar. Jajaran pengurus FBSI selalu diambil dari kader-kader Golkar. Walau demikian, FBSI tetap tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perselisihan perburuhan.

Terlebih sejak Soeharto mengeluarkan Keputusan 15 Nopember 1978 (KNOP 15) yang mendevaluasi nilai rupiah terhadap dolar, dari Rp 415 per dolar menjadi Rp 625 per





Masih berlakunya ekonomi kolonial di Indonesia telah membuat angkatan kerja yang ada memiliki tingkat pendidikan dan kecakapan yang sangat rendah. Dengan keadaan seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa sebagian besar buruh migran Indonesia hanya mengisi jenis pekerjaan dengan tingkat ketrampilan rendah dan upah yang sangat murah seperti misalnya pembantu rumah tangga. Pemerintah yang telah menjadi frustrasi karena tidak mampu memecahkan masalah pengangguran lantas menjadikan ekspor manusia sebagai andalan.

Pemerintah beranggapan bahwa buruh migran menjadi salah satu pemecahan masalah penyediaan lapangan pekerjaan dan pada saat yang sama peningkatan pendapatan negara. Sesungguhnya mengapa pemerintah sangat bersemangat menggalakkan ekspor buruh migran, salah satunya karena merupakan ladang emas bagi para aparatusnya yang korup.

Sebagai akibat berlakunya ekonomi kolonial, maka terjadi perkembangan ekonomi yang tidak merata : antara desa dengan kota, antar daerah dalam satu propinsi, antar propinsi, antara pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa.

Di daerah-daerah yang ekonominya lebih terbelakang terdapat surplus (jumlah berlebih) tenaga kerja yang lebih besar dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Hal ini mendorong penduduk untuk melakukan migrasi guna mencari pekerjaan termasuk dengan bekerja di luar negeri, baik secara resmi maupun













hanya gestur itu sendiri yang di komunikasikan.Sedangkan dengan bahasa yang di komunikasikan adalah gesture dan maknanya.

Salah satu hal yang dilakukan bahasa, atau simbol-simbol signifikan secara umum, adalah menghendaki respon yang sama pada diri individu yang berbicara sebagaimana respon yang akan dilakukan orang lain. Kata *anjing* atau *kucing* menimbulkan gambaran mental yang sama pada orang yang mengucapkan kata tersebut sebagai mana pada orang yang di ajak berbicara. Efek lain bahasa adalah bahwa dia merangsang orang yang berbicara dan merangsang orang lain. Orang yang berteriak “kebakaran” di gedung teater yang penuh sesak paling tidak memiliki dorongan untuk keluar dari gedung itu sama dengan orang yang diteriaki. Jadi simbol-simbol signifikan memungkinkan orang untuk menjadi perangsang tindakan mereka sendiri.

Karena orientasi pragmatismenya, Mead juga memerhatikan masalah fungsi gestur pada umumnya dan simbol-simbol signifikan pada khususnya. Fungsi gestur adalah memungkinkan terjadinya penyesuaian individu yang menerima dampak dari perbuatan sosial tertentu dengan merujuk pada satu atau beberapa objek yang terkait perbuatan tersebut” (Mead, 1934/1962:46). Jadi, mimik bisa dilakukan untuk mencegah seorang agar tidak terlalu dekat ketepi jurang, dan dengan demikian mencegahnya agar tetap jauh dari situasi yang membahayakan. Kalau gestur nonsignifikanpun bisa berfungsi,” maka simbol signifikan jauh



memiliki fasilitas bagi penyesuaian dan penyesuaian ulang ketimbang gestur nonsignifikan, karena dia mendorong individu bersikap sama terhadapnya dan memungkinkan menyesuaikan dengan perilakunya menurut sikap tersebut.

Dari sudut pandang pragmatis simbol signifikan bekerja lebih baik di dunia sosial ketimbang gestur nonsignifikan. Dengan kata lain ketika mengomunikasikan ketidaksukaan kita kepada orang lain, ucapan dengan nada marah bekerja jauh lebih baik ketimbang bahasa tubuh yang membingungkan. Biasanya, individu yang mengemukakan ketidaksukaanya tidak menyadari bahasa tubuh sehingga tidak mampu untuk menyesuaikan tindakan tindakan berikutnya secara sadar menurut orang lain berreaksi terhadap bahasa tubuh tersebut. Sebaliknya, pembicara menyadari adanya ucapan dengan nada marah dan bereaksi terhadapnya dengan cara yang hampir sama (dan pada waktu yang kurang lebih bersamaan) dengan orang yang ingin berreaksi. Jadi, pembicara dapat memikirkan bagaimana orang lain dapat bereaksi dan menyiapkan reaksinya terhadap reaksi tersebut.

Yang terpenting dalam teori Mead adalah fungsi lain simbol-simbol signifikan bahwa mereka memungkinkan terbentuknya pikiran, proses mental dan lain sebagainya. Hanya melalui simbol-simbol signifikan, khususnya bahasa, inilah, pemikiran manusia dimungkinkan (binatang yang lebih rendah tidak dapat berfikir, menurut bahasa Mead). Mead mendefinisikan

pemikiran “sekedar sekedar percakapan internal atau implisit individu dengan dirinya sendiri dengan menggunakan gestur tersebut.

Lebih kuat lagi Mead berargumen: “berfikir sama saja dengan berbicara dengan orang lain” (1982: 155). Dengan kata lain, dalam berfikir terdapat peroses berbicara dengan seseorang. Jadi, kita dapat melihat secara gamlang bagaimana mead mendefinisikan pemikiran dari sudut pandang behafioristik. Percakapan melibatkan perilaku (berbicara), dengan perilaku tersebut juga terjadi dalam diri individu; ketika ini terjadi, maka terjadilah proses berfikir. Ini bukan definisi mentalis atas proses berfikir, melainkan definisi behafioristik.

Simbol-simbol signifikanpun memungkinkan terjadinya interaksi simbolis. Jadi orang dapat berinteraksi dengan sama tidak hanya melalui gestur namun juga melalui simbol-simbol signifikan. Tentu saja, kemampuan ini menciptakan jagat perbedaan dan membuka peluang bagi pola interaksi dan organisasi sosial yang lebih kompleks yang hanya dimungkinkan melalui gestur.

Simbol signifikan jelas memainkan peran sentral dalam pemikiran Mead. Bahkan David Miller menyebutkan bahwa simbol signifikan adalah hal paling utama dalam teori Mead.

dengan mengikuti Mead, teoritisi interaksionisme simbolik cenderung menyetujui pentingnya sebab musabbab interaksi sosial. Dengan demikian, makna bukan berasal dari peroses mental yang

